

Hubungan Antara Nilai-nilai Nasional dan Prasangka Terhadap Etnis Minoritas Tionghoa

Farrel Radista¹

Fakultas Psikologi, Universitas Indonesia
farristazulkarnaen@gmail.com

Eko Aditiya Meinarno²

Fakultas Psikologi, Universitas Indonesia
meinarno@ui.ac.id

Abstract

Indonesia is a country with Pancasila as a foundation of its national values, which include religious-tolerance values, humanity, unity, democracy, social justice, and multiculturalism. As a multicultural country, however, Indonesia is still facing prejudice issues against ethnic minorities, especially the Chinese ethnicity. This study uses a correlational method involving 277 participants. Measurement of each value shows multiple results as follows: correlation between religious-tolerance values and prejudice against Chinese minority results in $r = -.159$ ($p < 0,01$), r for humanity = $-.242$ ($p < 0,01$), r for unity-patriotism = $-.143$ ($p < 0,05$), r for democracy = $-.220$ ($p < 0,01$), r for social justice = $r = -.177$ ($p < 0,05$), the results of this study are analyzed in the discussion section.

Keywords: prejudice, indigo-national values, Pancasila, ethnic minority Tionghoa

Abstrak

Indonesia merupakan negara multikultural yang menerapkan ideologi Pancasila sebagai landasan nilai-nilai nasionalnya. Nilai-nilai nasional tersebut berupa nilai religio-toleransi, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai demokrasi, nilai keadilan sosial, dan nilai multikulturalisme. Namun, sebagai negara multikultural, Indonesia masih dihadapkan dengan permasalahan prasangka terhadap etnis minoritas, terutama pada Etnis Minoritas Tionghoa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan antara nilai-nilai nasional tersebut dengan prasangka terhadap Etnis Minoritas Tionghoa. Penelitian menggunakan penelitian korelasional dengan 277 partisipan. Pengukuran pada tiap nilai menunjukkan beberapa hasil. Hubungan antara nilai religio-toleransi dengan prasangka terhadap etnis Tionghoa sebesar $r = -.159$ ($p < 0,01$), nilai kemanusiaan dengan prasangka sebesar $r = -.242$ ($p < 0,01$), nilai persatuan dengan prasangka sebesar $r = -.143$ ($p < 0,05$), nilai demokrasi dengan prasangka sebesar $r = -.220$ ($p < 0,01$), nilai keadilan sosial dengan prasangka sebesar $r = -.177$ ($p < 0,05$), Hasil dalam penelitian ini dibahas dalam diskusi.

Kata kunci: prasangka, nilai-nilai nasional, Pancasila, etnis minoritas, Tionghoa

Pendahuluan

Selama rentang satu dasawarsa (2010-2020) Indonesia mengalami kondisi janggal. Jika selama ini masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang ramah dan toleran, perlahan menjadi masyarakat yang mudah tersulut semangat anti kelompok lain. Hubungan antara masyarakat Indonesia yang menganggap dirinya pribumi dengan masyarakat etnis Tionghoa dapat dikatakan tidak harmonis. Dari tahun ke tahun, konflik masih terjadi antara masyarakat pribumi dengan etnis Tionghoa, seperti yang terjadi di kerusuhan anti-China di Kudus tahun 1918, kerusuhan Bandung 1978, dan kerusuhan Mei 1998. Riset-riset terdahulu secara konsisten menunjukkan pola hubungan yang buruk antara etnis Pribumi dengan etnis Tionghoa di Indonesia. Seperti hasil penelitian Meinarno (2009) yang menjelaskan bahwa terjadinya prasangka negatif terhadap etnis Tionghoa yang sudah terjadi sejak lama, bahkan sejak zaman penjajahan Belanda. Senada dengan Meinarno, Burhan dan Sani, (2013), Lestari (2015) dan Jatmiko (2019) juga mengatakan bahwa prasangka negatif terhadap etnis Tionghoa, terjadi dalam masyarakat Indonesia. Beberapa bentuk prasangka tersebut seperti adanya sentimen negatif terhadap simbol-simbol etnis Tionghoa oleh masyarakat pribumi di Medan (Burhan dan Sani, 2013), adanya kerusuhan SARA (Lestari, 2015), dan adanya pelarangan simbol-simbol etnis Tionghoa pada era Orde Baru (Jatmiko, 2019).

Berbagai alasan pemicu konflik antar golongan telah dikemukakan, seperti adanya kesenjangan ekonomi (Smith, Pettigrew, Pippin, dan Bialosiewicz, 2012; dalam Kite dan Whitley, 2016), perbedaan agama (Putra, 2016), dan yang terkini adalah masalah politik (Lestari, 2015). Konflik antargolongan yang ada di Indonesia berseberangan dengan kondisi nyata Indonesia yang merupakan sebuah negara multikultural.

Wujud hubungan tidak harmonis antar etnis ini didasari oleh dugaan-dugaan yang belum tentu dapat dibuktikan berdasarkan fakta atau data ilmiah. Dugaan ini yang dalam psikologi sosial disebut sebagai prasangka. Dalam penelitian ini wujudnya adalah adanya prasangka terhadap etnis minoritas. Di Indonesia, salah satu etnis yang sering memperoleh prasangka buruk yaitu etnis Tionghoa. Meinarno (2009) menjelaskan bahwa perilaku prasangka terhadap Etnis tionghoa di Indonesia sudah lama terjadi, bahkan sebelum Indonesia mengalami kemerdekaan. Gejala yang mirip juga terjadi di Amerika Serikat (Kunst et al., 2019) dan Inggris (Durheim et al., 2015).

Kenyataan tidak harmoni ini berlawanan dengan ide dari nilai nasional yang dipegang dan dipertahankan selama ini. embentukan nilai-nilai nasional di Indonesia diambil dari penyatuan nilai-nilai suku bangsa yang ada di Indonesia (Lestari, 2018). Hal ini selaras dengan ide Pancasila sebagai hal yang mengikat seluruh bangsa Indonesia. Pancasila sebagai nilai nasional adalah identifikasi penerimaan gagasan mengenai apa yang tepat, sesuai harapan dan baik disertai lawannya (tidak benar, tidak tepat, tidak sesuai harapan dan salah) berdasar Pancasila yang diukur dalam lima dimensi religio-toleransi, kemanusiaan, patriotisme-persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial (Meinarno, 2017). Kelima nilai nasional ini yang menjadi dasar perilaku bermasyarakat Indonesia.

Berdasar pemahaman bahwa nilai mendasari cara interaksi manusia, maka riset ini hendak menguji hubungan dari nilai nasional dan prasangka terhadap etnis minoritas yang dalam hal ini adalah etnis Tionghoa. Hal ini didasari pemahaman bahwa nilai nasional tidak

selaras dengan perilaku negatif antarkelompok. Penelitian ini juga akan memberi kontribusi pemahaman bahwa nilai nasional mendukung kehidupan multikultural yang selama ini hidup di Indonesia.

Gordon Allport (dalam Durrheim, Quayle, & Dixon, 2015) menjelaskan bahwa prasangka merupakan pandangan individu terhadap kelompok luarnya. Pandangan tersebut dapat berupa pandangan negatif dan pandangan positif terhadap kelompok luar berdasarkan kelompok sosialnya. Biasanya, prasangka didasari karena adanya perbedaan kelompok sosial seperti identitas ras, etnis, suku, agama, bahkan perbedaan norma antarkelompoknya (Durrheim et al., 2015; Putra, 2016; Verkuyten & Yogeewaran, 2017). Alasan terjadinya prasangka secara umum muncul dari dua hal yakni adanya jarak sosial antarkelompok (Durrheim et al., 2015), dan kurangnya interaksi antarkelompok secara langsung (Hewstone et al., 2014).

Putra (2016) menjelaskan bahwa prasangka merupakan suatu bentuk sikap dan pemikiran negatif terhadap kelompok lain. Pemikiran negatif tersebut berupa pemikiran bahwa kelompok luarnya merupakan kelompok yang jahat dan merupakan ancaman terhadap kelompoknya. Selain itu, Putra (2016) juga menunjukkan bahwa seringkali prasangka terhadap kelompok luar terjadi karena adanya anggapan dalam diri individu bahwa kelompok *ingroup*-nya memperoleh prasangka buruk dari kelompok luar.

Durrheim et al., (2015) juga menjelaskan bahwa individu yang melakukan prasangka terhadap kelompok lain, tidak jarang, menyadari bahwa perilaku prasangka tersebut merupakan pelanggaran norma sekitarnya. Individu tersebut tidak jarang melakukan justifikasi atas prasangka yang diutarakannya agar tidak menimbulkan permasalahan. Para pelaku prasangka tersebut terkadang juga melakukan penyangkalan terhadap tindakan prasangkanya agar tidak disalahkan apabila timbul permasalahan antarkelompok.

Ada beberapa alasan lain individu memberikan prasangka terhadap kelompok luarnya. Identifikasi sosial merupakan salah satu penyebab munculnya prasangka sosial. Identifikasi sosial merupakan suatu proses individu mengkategorikan dirinya dalam suatu kelompok sosial (Hogg, 2016). Kelompok sosial ini mencakup berbagai norma mengenai bagaimana nilai individu tersebut dalam kelompok sosialnya, bagaimana kelompok sosial mengatur individu tersebut, dan bagaimana kelompok tersebut membedakan dirinya dengan kelompok lain. Ferdman dan Horenzyck (2000; dalam Ferguson, et al., 2016) menjelaskan bahwa individu mengidentifikasi dirinya ke dalam sebuah kelompok setelah adanya proses eksplorasi maupun internalisasi norma, tingkah laku, kepercayaan maupun kebudayaan dalam kelompok tersebut yang dianggap dinamis bagi diri mereka sendiri. Namun, pada umumnya, secara alamiah individu mengkategorikan dirinya sebagai bagian dari kelompok etnis, suku, maupun ras berdasarkan silsilah keluarganya (Upadhyayula, Ramaswamy, Chalise, Daniels, dan Freudenberg, 2015).

Tajfel dan Turner (1979, dalam Lorenzi-Cioldi, et al., 2011) menjelaskan dalam teori identifikasi sosial, individu yang melekat terhadap kelompoknya, cenderung merendahkan kelompok lain dalam upaya memperkuat identitas kelompok sosialnya. Individu juga merasa terancam apabila kelompoknya merasa direndahkan oleh kelompok lain. Individu tersebut juga mengkategorikan dirinya sebagai bagian dari suatu kelompok karena terdapat penilaian kesamaan sifat antara dirinya dengan kelompok tersebut dan perbedaan dengan kelompok

lain. Hal inilah yang seringkali mendorong individu memberikan prasangka terhadap kelompok lainnya.

Brambilla, Manzi, Regalia, & Verkuyten, (2013 dalam Putra, 2016) yang mengatakan bahwa individu yang religius, cenderung memiliki prasangka yang tinggi maupun rendah terhadap kelompok agama lain. Hal ini tergantung pada bagaimana individu tersebut mengamalkan ajaran yang diajarkan pada agama tersebut. Apabila individu tersebut lebih mengamalkan nilai-nilai prososial dalam agamanya, individu tersebut cenderung memberikan prasangka yang rendah terhadap kelompok lainnya. Dan apabila individu tersebut mengamalkan ajaran agama yang memberikan prasangka terhadap kelompok agama lain, individu tersebut cenderung memberikan prasangka terhadap kelompok agama lain. Karenanya, menurut Brambilla, et al., (2013; dalam Putra, 2016) bagaimana individu dapat memberikan prasangka kepada kelompok lain, bukan karena tingkat religiusitasnya, namun tergantung bagaimana individu tersebut menjalankan ajaran agamanya.

Lestari (2015) mengatakan bahwa salah satu tantangan terbesar dalam sebuah negara multikultural yaitu munculnya prasangka antarkelompok. Hal ini terjadi karena setiap kelompok memiliki norma, adat, dan budaya yang berbeda satu sama lain. Lestari (2015) mengatakan bahwa perbedaan ini terkadang berujung timbulnya konflik antar etnis dan suku. Hal senada juga dikatakan oleh Sarwono (2006) yang mengatakan bahwa salah satu permasalahan yang timbul dalam suatu kelompok masyarakat multikultur yaitu adanya prasangka antarkelompok. Sarwono memberi contoh konflik di Sampit, Kalimantan Tengah pada tahun 2001, dimana terjadi perpecahan antara suku Madura, Dayak dan Melayu yang berujung pada kerusuhan antarkelompok tersebut. Sarwono (2006), juga menjelaskan bahwa dalam Konflik Sampit, konflik dan prasangka antar etnis tersebut dikarenakan sifat eksklusivisme pada tiap-tiap etnis tersebut. Suku Bangsa Dayak dan Madura seperti enggan mengubah nilai-nilai eksklusivitas suku bangsa mereka yang menyebabkan sulitnya terjadinya interaksi antar kelompok. Hal inilah yang menyebabkan sulitnya terjadi interaksi antar etnis, sehingga timbul prasangka hingga konflik antar etnis.

Lestari (2015) lebih lanjut menjelaskan bahwa salah satu hal yang memicu munculnya konflik di Indonesia yaitu adanya kecemburuan sosial antar kelompok. Ia juga menambahkan bahwa terkadang, kecemburuan sosial tersebut dipicu oleh adanya seseorang ataupun sekelompok orang yang melakukan tindakan intoleran yang mengatasnamakan suku, agama, dan ras kelompoknya. Hal ini terkadang ikut membawa masyarakat yang tergolong dalam kelompoknya ikut terpicu untuk melakukan hal yang serupa.

Meinarno, (2009) menjelaskan bahwa prasangka terhadap etnis minoritas Tionghoa sudah berlangsung sejak lama. Hal ini dimulai semenjak era penjajahan Belanda. Pihak Belanda menempatkan etnis Tionghoa dalam kelas sosial, di atas kaum pribumi di Indonesia. Dalam hal ini, masyarakat Tionghoa memperoleh berbagai macam hak istimewa yang diberikan oleh pihak Belanda, seperti diperbolehkan untuk mengumpulkan pajak kaum pribumi. Hal inilah yang menyebabkan munculnya kebencian terhadap etnis Tionghoa oleh kaum pribumi. Kebencian yang terekam berlanjut di awal hingga penghujung abad keduapuluh, beberapa kejadian bernuansa kebencian itu antara lain huru-hara anti-Cina di Kudus tahun 1918, peristiwa kerusuhan Bandung 1973, hingga kerusuhan Mei 1998.

Jatmiko (2019) mengatakan bahwa dalam era reformasi muncul upaya untuk

mengurangi sentimen negatif antarkelompok. Hal ini dimulai sejak adanya beberapa kebijakan pemerintah Indonesia sejak era Reformasi yang dianggap menghargai etnis Tionghoa, seperti pencabutan penggunaan status “pribumi atau non-pribumi” dalam instansi pemerintahan yang dianggap memberikan stereotipe negatif terhadap etnis Tionghoa dan perizinan media cetak berbahasa Mandarin. Kondisi ini berlanjut pada temuan fenomena dimana individu etnis Tionghoa, memulai membaurkan diri dengan masyarakat mayoritas yang menyebabkan mereka mudah diterima di masyarakat. Hal ini turut menciptakan masyarakat yang harmonis.

Dalam sebuah masyarakat yang heterogen, seringkali ditemukan rendahnya prasangka antarkelompok. Hal ini dikarenakan adanya interaksi yang intens antar kelompok yang membuat kelompok tersebut lebih mengenal satu sama lain (Hewstone et al., 2014; Kunst et al., 2019). Selain itu, menurut van Dick, van Knippenberg, Hägele, Guillaume, & Brodbeck, (2008, dalam Adesokan et al., 2011) mengatakan bahwa banyak masyarakat yang mengadopsi pola masyarakat yang majemuk, karena dianggap lebih mampu mengembangkan masyarakat tersebut secara bersama-sama dibandingkan dengan masyarakat yang homogen. Shi, Dang, Zheng, dan Liu, (2017) menjelaskan bahwa salah satu hal yang dapat menurunkan prasangka antar kelompok dalam individu, yaitu adanya perasaan memiliki identitas yang sama, seperti identitas nasional. Walaupun individu tersebut mengetahui bahwa dirinya memiliki perbedaan identitas kelompok dengan kelompok lain, seperti perbedaan status sosio-ekonomi, individu tersebut tidak akan memberikan prasangka terhadap kelompok luarnya karena menyadari adanya kesamaan identitas antar kelompoknya, seperti memiliki identitas nasional yang sama dengan kelompok luarnya.

Nilai nasional lahir dari pemahaman Pancasila. Dalam pidato Soekarno dalam rapat BPUPKI 1945 menyebutkan bahwa kata “sila” dari Pancasila berarti nilai. Nilai ini yang diharapkan menjadi dasar terbentuknya tingkah laku masyarakat Indonesia yang khas. Menjadi khas karena Pancasila digali dari kebudayaan bangsa Indonesia (Soekarno 1958 [2008]). Ia menambahkan bahwa Pancasila Catatan digali dari lapisan-lapisan sejarah bangsa Indonesia.

Dalam psikologi ide tentang dasar tingkah laku adalah nilai. Ide Pancasila sebagai nilai kembali diajukan oleh Latif (2020). Hal ini didukung oleh kajian Meinarno dalam koridor psikologi sosial. Meinarno menunjukkan hal ini dalam berbagai penelitian psikologi sosial, khususnya dalam masalah kebangsaan (Meinarno & Suwartono, 2010; Suwartono & Meinarno, 2011; Meinarno & Suwartono, 2013; Mashoedi & Meinarno, 2016; Meinarno, 2017; Meinarno, Putri, & Fairuz, 2019; Suwartono, Meinarno, 2012). Konsep ini menguraikan Pancasila yang selama ini dianggap sebagai perjanjian bersama yang didasari nilai-nilai yang berlaku umum di Indonesia.

Upaya ini pada akhirnya melahirkan ide bahwa memunculkan sebuah ide mengenai nilai-nilai kebangsaan yang merupakan penyatuan dari nilai-nilai suku bangsa di Indonesia.

Pancasila	Nilai Nasional	Definisi
Ketuhanan yang Maha Esa	Nilai Religio-toleransi	Percaya pada Tuhan dan menjalankan perintah-Nya sesuai keyakinan dan tidak memaksakan kepercayaan pada orang lain
Kemanusiaan yang adil dan beradab	Nilai Kemanusiaan	Mengakui persamaan hak dan kewajiban, sayang pada sesama, menjalin hubungan dengan bangsa lain berdasar sikap saling menghormati
Persatuan Indonesia	Nilai Patriotisme-persatuan	Mengutamakan kepentingan bangsa daripada diri/kelompok, cinta tanah air dan bangsa dan mengembangkan rasa persatuan bagi bangsa.
Kerakyatan yang dipimpin oleh khidmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan	Nilai Demokrasi	Pengambilan keputusan berdasar musyawarah untuk kepentingan bersama dengan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, dapat dipertanggungjawabkan dan melaksanakan keputusan yang diambil.
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia	Nilai Keadilan sosial	Menjaga keseimbangan hak-kewajiban sosial dengan mawas diri (dalam bentuk kualitas luhur manusia) dan pengembangan diri yang bertujuan untuk memajukan kehidupan sosial.

Tabel 1. Dimensi-dimensi nilai nasional dan definisinya (lihat Meinarno, 2017; Meinarno, Putri, & Fairuziana, 2019).

Nilai Religio-toleransi merupakan terjemahan dari sila pertama. Merujuk paparan Soekarno (1959[2008]), ketuhanan adalah elemen dasar yang diketahui masyarakat Indonesia. Ketuhanan tidak terjebak pada institusi agama yang tertera pada data kependudukan. Ketuhanan mengacu pada spiritualitas yang merupakan kekuatan yang memampukan seseorang meyakini adanya kekuatan besar yang melampaui alam semesta. Posisi ini menempatkan individu tidak merasa hidup sendiri. Manusia harus saling memberi penghormatan terhadap manusia lainnya. Hal ini konsekuensi dari paham bahwa ketaatan pada kekuatan diluar dirinya yang pada akhirnya berujung pada Tuhan (Notonagoro, 1987 dalam Umarhadi, 2022). Manusia lain adalah juga ciptaan-Nya, dengan demikian menghormati orang lain adalah bagian dari garis lurus dari penghormatan kepada Tuhan.

Nilai Kemanusiaan. Merujuk Soekarno (1958[2008]) peri kemanusiaan adalah jiwa yang merasakan bahwa antara tiap individu ada hubungannya. Hubungan antarmanusia ini terwujud dalam tingkah laku yang baik dan berguna bagi lebih dari satu pihak. Agar dapat berguna bagi banyak pihak, individu diharapkan dapat menyelaraskan diri dalam akal, rasa, dan kehendak (Notonagoro, 1987, dalam Umarhadi, 2022). Bentuk tingkah laku sederhana berdasar nilai ini adalah bersahaja, tidak berlebihan, menjaga keseimbangan, teguh, dan adil bagi diri dan orang lain (Notonagoro, 1987 dalam Umarhadi, 2022). Terbangunnya rasa adil maka diharapkan akan mewujudkan dalam menjalankan kewajiban dan hak dari individu.

Nilai Patriotisme-persatuan. Menurut Soekarno (1958[2008]) kesatuan memiliki arti merasa bagian dari. Dengan demikian ketika bagian yang rusak maka mengganggu bagian lainnya. Perasaan menjadi satu bagian ini yang perlu mengutamakan kepentingan bangsa. Merujuk pada kesatuan dan cinta tanah air, yang artinya agar mencapainya perlu untuk tidak mementingkan perbedaan. Bentuk tingkah laku sederhana berdasar nilai ini adalah pengakuan terhadap perbedaan karena itu adalah hal wajar.

Nilai Demokrasi. Dalam salah satu pidatonya, Soekarno menegaskan bahwa hidup bersama yang tolong-menolong harus didasarkan demokrasi kedaulatan rakyat. Hal ini terkait upaya untuk meraih apa yang diinginkan bersama (Soekarno, 1958[2008]) untuk meraih kepentingan bersama dari berbagai latar pikiran berpeluang memunculkan masalah. Masalah harus dipecahkan dengan cara berpikir. Dalam nilai demokrasi ini butuh kecakapan dalam menghadapi kesulitan atau masalah. Individu diharapkan mampu mengerti, memahami mengenai orang lain, keadaan, sampai pengetahuan. Kemampuan ini menjadi dasar untuk membangun pemecahan masalah berdasar pengetahuan dan jalan (proses) yang benar.

Nilai Keadilan sosial. Merujuk pada Soekarno (1959/2008), keadilan sosial adalah sifat masyarakat adil dan makmur. Harapannya pada masyarakat seperti itu adalah hilangnya penghinaan, penindasan, dan penghisapan. Agar tercapai adalah wajar jika tuntutan tingkah laku dari nilai keadilan sosial adalah mampu bertingkah laku adil secara timbal balik agar semua mendapat keadilan. Tiap individu berada dalam tatanan masyarakat yang saling membutuhkan. Oleh karenanya, tidak ada pengharapan adanya eksploitasi individu terhadap individu lainnya (Drijarkara, 2006 dalam Umarhadi, 2022).

Metode

Penelitian dilakukan menggunakan metode korelasional untuk menghubungkan variabel nilai-nilai nasional dengan variabel prasangka. Penelitian dilakukan pada 277 partisipan yang merupakan warga negara Indonesia berusia 18 hingga 28 tahun. Peneliti menggunakan metode *accidental sampling* dalam proses pengambilan data.

Prasangka diukur menggunakan alat ukur yang dibuat oleh Putra (2016) yang berisikan enam buah pertanyaan. Menggunakan skala bipolar dengan rentang respon 1 hingga 6 dalam tiap-tiap item. Item dalam alat ukur tersebut berupa “menurut anda, etnis Tionghoa: ‘mengancam-dapat dipercaya’, ‘menyebalkan-ramah’, ‘pemalas-teknis’, ‘jahat-baik’, ‘bodoh- cerdas’, dan ‘tidak bermartabat-bermartabat’”. Skor yang diperoleh pada setiap item akan di-reverse. Partisipan yang memiliki skor tinggi menunjukkan memiliki tingkat prasangka negatif yang tinggi. Pengujian reliabilitas alat ukur prasangka dengan metode Cronbach’s Alpha menunjukkan nilai sebesar 0.833.

Nilai nasional diukur dengan alat ukur skala nilai nasional (Meinarno, 2017). Terdapat lima dimensi nilai nasional yakni religio-toleransi, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai demokrasi, dan nilai keadilan sosial. Pengukuran dimensi nasionalisme diukur menggunakan alat ukur nasionalisme yang dibuat oleh Meinarno. Pada beberapa penelitian angka reliabilitas dari skala ini adalah untuk Skala prasangka memiliki nilai *Cronbach Alpha* sebesar 0,873. Skala dimensi religio-toleransi memiliki nilai *Cronbach Alpha* sebesar 0,653. Skala dimensi kemanusiaan memiliki nilai *Cronbach Alpha* sebesar 0,690. Skala dimensi patriotisme-persatuan memiliki nilai *Cronbach Alpha* sebesar 0,85.

Skala dimensi demokrasi memiliki nilai *Cronbach Alpha* sebesar 0,69. Skala dimensi keadilan sosial memiliki nilai *Cronbach Alpha* sebesar 0,769.

Dimensi nilai religio-toleransi terdiri lima butir pernyataan, salah satunya yaitu: “Saya berusaha menghormati pemeluk agama lain dalam situasi atau kondisi apapun”. Setiap pernyataan memiliki respon pada rentang skala 1 hingga 6.

Dimensi nilai kemanusiaan terdiri dari empat pernyataan, salah satunya adalah “Saya yakin bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Tuhan Yang Maha Esa”. Setiap pernyataan memiliki respon pada rentang skala 1 hingga 6.

Dimensi nilai patriotisme-persatuan terdiri dari lima pernyataan, salah satunya adalah “Saya menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi”. Setiap pernyataan memiliki respon pada rentang skala 1 hingga 6.

Dimensi nilai demokrasi terdiri dari lima pernyataan, diantaranya adalah “Sebagai warga negara Indonesia mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama”. Setiap pernyataan memiliki respon pada rentang skala 1 hingga 6. Pada aitem “Suara terbanyak voting adalah cara terbaik untuk pengambilan keputusan” merupakan item *reverse*.

Dimensi nilai keadilan sosial terdiri dari enam pernyataan, salah satunya adalah “Saya ikut serta dalam kegiatan gotong-royong di lingkungan rumah”. Setiap pernyataan memiliki respon pada rentang skala 1 hingga 6.

Hasil dan Pembahasan

Jumlah perempuan dalam penelitian ini sebanyak 220 orang, 53 lelaki, dan dua orang yang merahasiakan jenis kelaminnya. Berdasarkan latar pendidikannya, sebanyak 65 orang berlatar pendidikan Sarjana, 209 orang berlatar pendidikan SMA, dan sebanyak 1 orang berlatar pendidikan SMP. Berdasarkan suku bangsanya, sebanyak 115 orang berasal dari Jawa, 38 orang berasal dari Sunda, 13 orang berasal dari Minangkabau, 24 orang berasal dari Betawi, 16 orang berasal dari Batak, 5 orang berasal dari Minahasa, dan 64 berasal dari suku bangsa lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara seluruh dimensi nilai-nilai nasional dan prasangka terhadap Etnis Tionghoa. Nilai religio-toleransi memiliki hubungan negatif yang signifikan dengan prasangka ($r = -,159, p < 0,01$). Pada dimensi nilai kemanusiaan terdapat hasil yang negatif signifikan terhadap prasangka ($r = -,242, p < 0,01$). Pada nilai patriotisme-persatuan terjadi hasil hubungan negatif yang signifikan terhadap prasangka ($r = -,143, p < 0,05$). Pada nilai demokrasi terjadi hubungan yang negatif signifikan terhadap prasangka ($r = -,220, p < 0,01$). Pada nilai keadilan sosial terhadap prasangka ($r = -,177, p < 0,05$).

Hasil penelitian ini secara prinsip tidaklah mengejutkan. Nilai nasional atau nilai, pada dasarnya tidak mempunyai kecenderungan untuk membentuk tingkah laku negatif. Hasil ini menegaskan bahwa secara empirik ilmiah bahwa nilai nasional yang dianut bangsa Indonesia berhubungan negatif terhadap prasangka, yang secara khusus prasangka terhadap etnis Tionghoa.

Berdasarkan hasil penelitian, nilai religio-toleransi memiliki korelasi negatif yang signifikan dengan prasangka. Artinya, apabila individu mengamalkan nilai-nilai religio-

toleransi dengan baik, akan memberikan prasangka yang rendah dengan kelompok minoritas Tionghoa. Sebagaimana definisi nilai religio-toleransi yakni percaya pada Tuhan dan menjalankan perintah-Nya sesuai keyakinan dan tidak memaksakan kepercayaan pada orang lain. Selain itu, individu tersebut tidak hanya memahami dan menjalankan ajaran agamanya saja, namun juga turut memberikan kebebasan kepada orang lain dalam menjalankan hak dan kewajiban agamanya masing-masing (Meinarno, 2017). Hal senada juga diutarakan oleh Brambilla, et al., (2013; dalam Putra, 2016) yang mengatakan bahwa individu yang religius, cenderung memiliki prasangka yang rendah terhadap kelompok agama lain apabila individu tersebut mengamalkan nilai-nilai prososial dalam ajaran agamanya. Kami berpendapat bahwa partisipan dalam penelitian ini mengamalkan nilai-nilai prososial dalam agamanya masing-masing. Karenanya, partisipan cenderung tidak memberikan prasangka yang tinggi terhadap etnis Tionghoa.

Nilai kemanusiaan berhubungan negatif terhadap prasangka dalam penelitian ini. Sebagaimana definisinya yakni mengakui persamaan hak dan kewajiban, sayang pada sesama, menjalin hubungan dengan bangsa lain berdasar sikap saling menghormati. Salah satu hal yang mendorong faktor kemanusiaan yang dapat mendorong terjadinya hubungan yang negatif dengan prasangka karena adanya interaksi antarkelompok (Hewstone, 2014). Interaksi antarkelompok tersebut membuat individu tersebut memahami individu yang berasal dari kelompok luarnya. Hasil riset ini dapat mengantarkan pada kerangka pikir bahwa partisipan tidak melihat perbedaan antara dirinya dan kelompok etnis minoritas. Partisipan tidak menyetujui prasangka dan diwujudkan dengan tidak mementingkan perbedaan identitas ras, etnis, suku, agama, bahkan perbedaan norma antarkelompoknya sebagaimana temuan riset tentang prasangka (Durrheim et al., 2015; Putra, 2016; Verkuyten & Yogeewaran, 2017). Selain itu, Meinarno (2017) juga menuturkan bahwa individu yang memiliki humanitas yang tinggi cenderung menurunkan kebanggaan berlebih terhadap kelompok dirinya (seperti chauvinisme) (Notonagoro, 1987 dalam Umarhadi, 2022), dan dapat mendorong individu untuk tidak merendahkan kelompok lain.

Nilai patriotisme-persatuan mendorong individu untuk lebih mengedepankan kelompok besarnya (seperti kelompok nasionalnya) dibandingkan dengan kelompok dirinya sendiri (Meinarno, 2017; Notonagoro, 1987 dalam Umarhadi, 2022). Individu dituntut untuk merasa sebagai bagian dari sebuah kesatuan kelompok besar yang heterogen yang merupakan penyatuan dari kelompok-kelompok kecil walaupun memiliki perbedaan antar kelompoknya. Hal senada dengan diutarakan oleh Shi, et al., (2017) yang mengatakan bahwa dalam masyarakat yang heterogen, individu cenderung memberikan prasangka yang rendah kepada kelompok lain apabila memiliki kesamaan identitas antar kelompok tersebut, seperti kesamaan identitas nasional. Hal ini menunjukkan bahwa partisipan dalam penelitian ini memiliki pemahaman bahwa dirinya memiliki identitas nasional yang sama dengan kelompok etnis Tionghoa. Dengan demikian partisipan tidak memberikan prasangka tinggi kepada etnis Tionghoa karena menyadari bahwa mereka merupakan kesatuan sebagai bangsa Indonesia.

Dalam sebuah negara demokrasi, sebuah masyarakat dituntut untuk lebih mementingkan musyawarah dalam pengembangan kelompoknya. Menurut Meinarno (2017), individu yang mengamalkan nilai demokrasi dituntut bertanggung jawab dan tolong

menolong dalam mengembangkan kelompok masyarakatnya. Karenanya, individu tersebut juga diharapkan mau menghargai kelompok lainnya. Selain itu, menurut van Dick, van Knippenberg, Hägele, Guillaume, & Brodbeck, (2008, dalam Adesokan et al., 2011) mengatakan bahwa banyak masyarakat yang mengadopsi pola masyarakat yang majemuk, karena dianggap lebih mampu mengembangkan masyarakat tersebut secara bersama-sama dibandingkan dengan masyarakat yang homogen. Karenanya, tidak jarang dalam sebuah masyarakat yang majemuk mengalami sedikit prasangka karena mudah terbentuknya hubungan yang harmonis antarkelompok untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Dalam penelitian ini, kami menduga partisipan tinggal dan besar dalam kelompok masyarakat yang heterogen. Hal ini wajar karena partisipan yang merupakan warga negara Indonesia, yang tinggal dalam masyarakat heterogen yang memiliki kelompok etnis Tionghoa. Selain itu, partisipan diduga memiliki kesadaran diri untuk mau bahu-membahu dalam mengembangkan kelompok masyarakatnya dan saling menghormati satu sama lainnya. Karena itulah, partisipan tidak memberikan prasangka yang tinggi terhadap kelompok lain karena menyadari pentingnya hubungan yang harmonis dengan etnis Tionghoa untuk kemajuan lingkungan sosialnya.

Sama halnya seperti aspek demokrasi, aspek nilai keadilan sosial mendorong masyarakat untuk menjaga hak dan kewajiban sosial dengan mawas diri (dalam bentuk kualitas luhur manusia) dan pengembangan diri yang bertujuan untuk memajukan kehidupan sosial (Meinarno, 2017). Dalam pelaksanaannya, individu dituntut untuk saling menyayangi satu sama lain dan tidak mencoba untuk melakukan penghinaan satu sama lain, serta tidak mengeksploitasi pihak lain (Drijarkara, 2006 dalam Umarhadi, 2022). Dalam hal hubungan sosialnya, individu tersebut juga melakukan interaksi satu sama lain. Hal ini turut menjadikan individu tidak memberikan prasangka terhadap kelompok lain karena mampu memahami kelompok lain (Hewstone, et al., 2014). Berdasarkan hasil penelitian, kami menduga partisipan dalam penelitian ini sering berinteraksi dengan kelompok lainnya. Karenanya, kami menduga partisipan dalam penelitian ini memahami dan menghormati hak dan kewajiban kelompok luarnya. Dengan demikian partisipan dalam penelitian ini tidak memberikan prasangka yang tinggi terhadap etnis Tionghoa.

Simpulan

Sebagai negara multikultural, Indonesia memiliki tantangan tersendiri dalam menciptakan masyarakat yang rukun, seperti prasangka antargolongan yang dapat terjadinya konflik antar kelompok. Pengamalan nilai-nilai nasional perlu kita terapkan dengan baik untuk menciptakan kerukunan antar golongan di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Adesokan, A. A., Ullrich, J., Dick, R. V., & Tropp, L. R. (2011). Diversity beliefs as moderator of the contact–prejudice relationship. *Social Psychology, 42*(4), 271- 278. doi:10.1027/1864-9335/a000058
- Burhan, O. K., & Sani, J. (2013). Prasangka terhadap Etnis Tionghoa di Kota Medan: peran identitas nasional dan persepsi ancaman. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Psikologi*

(*Psikologia*), 8, 25–33.

- Durrheim, K., Quayle, M., & Dixon, J. (2015). The struggle for the nature of “prejudice”: “prejudice” expression as identity performance. *Political Psychology*, 37(1), 17-35. doi:10.1111/pops.12310
- Ferguson, G. M., Nguyen, J., & Iturbide, M. I. (2017). Playing up and playing down cultural identity: Introducing cultural influence and cultural variability. *Cultural Diversity and Ethnic Minority Psychology*, 23(1), 109–124. doi: 10.1037/cdp0000110
- Hewstone, M., Lolliot, S., Swart, H., Myers, E., Voci, A., Ramiah, A. A., & Cairns, E. (2014). Intergroup contact and intergroup conflict. *Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology*, 20(1), 39–53. doi: 10.1037/a0035582
- Hogg, M. A. (2016). Social identity theory. *Peace Psychology Book Series Understanding Peace and Conflict Through Social Identity Theory*, 3-17. doi:10.1007/978-3-319-29869-6_1
- Jatmiko, M. I. (2019). Hibridisasi masyarakat Tionghoa di Kecamatan Lasem pasca-reformasi. *Umbara*, 4(2), 101. doi:10.24198/umbara.v4i2.21697
- Lestari, G. (2015). Bhinneka Tunggal Ika: Khasanah multikultural Indonesia di tengah kehidupan sara. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 28(1), 31-37.
- Lorenzi-Cioldi, F., Chatard, A., Marques, J. M., Selimbegović, L., Konan, P., & Faniko, K. (2011). What do drawings reveal about people’s attitudes toward countries and their citizens?. *Social Psychology*, 42(3), 231–240. doi: 10.1027/1864-9335/a000067
- Meinarno EA. 2017. Peran identitas etnis, identitas agama, dan identitas nasional yang dimediasi nilai nasional terhadap Bhinneka Tunggal Ika. Disertasi strata tiga program doktoral Fakultas Psikologi Universitas Persada Indonesia YAI. Tidak dipublikasikan.
- Meinarno, EA., Mashoedi, SF. 2016. Pembuktian kekuatan hubungan antara nilai-nilai Pancasila dengan kewarganegaraan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. 1(1). Juni, 12-22.
- Meinarno, E. A. (2009). Sikap peribumi terhadap etnis Cina. *Setengah Abad Hubungan Malaysia-Indonesia*. Othman, M. R., Ishak, M. S., Jaafar, J. L., Meliala, A., & Murni, S. (Eds.). Arah Publication.
- Meinarno, EA; Suwartono, C. 2010. The measurement of Pancasila: An effort to make psychological measurement from Pancasila values. Naskah dipresentasikan dalam The First International Conference of Indigenous and Cultural Psychology. Yogyakarta, July 24-27, 2010.
- Meinarno, EA., Suwartono, C. 2011. The measurement of Pancasila: An effort to make psychological measurement of Pancasila scale. *Jurnal Ilmiah Mind Set*. 2(2). Juni, 104-110.
- Meinarno, EA., Putri, MA., Fairuziana. 2019. Isu-isu kebangsaan dalam ranah psikologi Indonesia dalam Psikologi Indonesia. Penyunting Subhan El Hafiz dan Eko A Meinarno. KPIN Rajawali Pers. Jakarta.

- Putra, I. E. (2016). Taking seriously ingroup self-evaluation, meta-prejudice, and prejudice in analyzing interreligious relations. *The Spanish Journal of Psychology*, 19. doi:10.1017/sjp.2016.48
- Sarwono, S. W. (2006). *Psikologi prasangka orang Indonesia: Kumpulan studi empirik prasangka dalam berbagai aspek kehidupan orang Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Soekarno. 1958 [2008]. Kursus presiden Soekarno tentang Pancasila di Istana Negara tanggal 16 Juni 1958. Dalam *Pancasila Dasar Negara: Kursus Presiden Soekarno tentang Pancasila*. PSP UGM dan Yayasan TIFA. Jakarta.
- Suwartono, C., Meinarno, EA. 2012. Value orientation scale: The validation of the Pancasila scale. *Jurnal Pengukuran Psikologi dan Pendidikan Indonesia*. 1(3). Juli, 175-183.
- Shi, Y., Dang, J., Zheng, W., & Liu, L. (2017). Dual identity and prejudice: the moderating role of group boundary permeability. *Frontiers in Psychology*, 8. doi:10.3389/fpsyg.2017.00195.
- Umarhadi, Y. (2022). *Hakikat manusia Pancasila menurut Notonagoro dan Drijarkara: Aktualisasinya bagi demokrasi Indonesia*. Penerbit PT Kanisius.
- Verkuyten, M., & Yogeeswaran, K. (2016). The social psychology of intergroup toleration. *Personality and Social Psychology Review*, 21(1), 72-96. doi:10.1177/1088868316640974.
- Whitley, B. E., & Kite, M. E. (2016). *The psychology of prejudice and discrimination* (3rd ed.). Routledge.